



**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN KOTA JAYAPURA,  
KABUPATEN JAYAPURA DAN KABUPATEN KEEROM TAHUN  
ANGGARAN 2016-2019**

**Penina Maran<sup>1</sup>, Y Flora Hosio<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Ottow Geissler Papua

<sup>1</sup>[peninayaurakmaran@gmail.com](mailto:peninayaurakmaran@gmail.com), <sup>2</sup>[yhosioflora@gmail.com](mailto:yhosioflora@gmail.com)

**Info Artikel :**

Diterima : 5 Agustus 2022

Disetujui : 10 Agustus 2022

Dipublikasikan : 19 Agustus 2022

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan dari informasi keuangan pada Pemerintah Kota Jayapura sebagai Ibu Kota Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura serta Kabupaten Keerom berdasarkan Rasio Kemandirian, dan Rasio Efektifitas pada tahun Anggaran 2016 s/d 2019. Jenis penelitian ini yaitu Deskriptif dengan menguraikan sifat dan karakteristik dari suatu objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom dengan kriteria berikut yaitu: rata-rata rasio Kemandirian keuangan daerah 3 Kabupaten/Kota yang dianalisis selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 2016-2019, tingkat kemandirian keuangan daerah tertinggi terjadi pada Kota Jayapura yaitu sebesar 243,36%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Jayapura tidak memiliki ketergantungan yang tinggi lagi terhadap pemerintah pusat dan sudah mampu untuk melaksanakan urusan otonomi daerah. Dan dari perhitungan rata-rata rasio efisiensi belanja yang diperoleh selama 4 tahun dari tahun 2016-2019 di ketiga Kabupaten/Kota dianalisis menunjukkan pemerintahan Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom mampu mencapai kriteria sangat efisien yaitu diatas 100% yaitu rerata 108%-116%.

**Kata Kunci :**  
Kinerja  
keuangan,  
Rasio  
keuangan,  
Kota jayapura,  
Kabupaten  
jayapura,  
Kabupaten  
keerom

**ABSTRACT**

*This research is aimed to determine the financial performance to informances financial to the government in the Jayapura City to Papua Province and Jayapura Regency and then Keerom Regency be based on autonomy, and, and efficiency financial budget to years from 2016 to 2019. This type of research is descriptive by describing the nature and characteristics of an object of research. The results of this study indicate that the financial ratios used to measure the financial performance of Jayapura City, Jayapura Regency and Keerom Regency with the following criteria: the average regional financial independence ratio of 3 districts/cities analyzed for 4 consecutive years from 2016-2019 . In 2019, the highest level of regional financial independence occurred in Jayapura City, which was 243.36%. This shows that the Jayapura City Government does not have a high dependence on the central government and is able to carry out regional autonomy affairs. And from the calculation of the average spending efficiency ratio obtained for 4 years from 2016-2019 in*

**Keywords :**  
Financial  
performance,  
Financial ratio,  
Jayapura city,  
Jayapura  
regency, Keerom  
regency

*the three regencies/cities analyzed, it shows that the government of Jayapura City, Jayapura Regency and Keerom Regency is able to achieve the very efficient criteria, which is above 100%, namely average -average 108%-116%.*

---

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah Daerah adalah pihak yang menjalankan pemerintahan, dan pembangunan serta pelayanan kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua ini dan masyarakat wajib untuk menyerahkan atau melaporkan yang disebut dengan kata lain mempertanggungjawabkan/ pertanggungjawaban daerahnya untuk menilai dan melihat apakah pemerintahan daerah tersebut sudah mengelola keuangan dengan baik atau malah sebaliknya dengan begitu alat yang biasanya digunakan untuk mengukur dan menganalisis laporan-laporan tersebut adalah dengan menggunakan analisis rasio yang sudah ada dan disesuaikan dengan UU Nomor. 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dengan menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban dalam daerah otonomi untuk mengatur diri sendiri dan untuk urusan pemerintahan dan bagi kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Putri, 2018)

Kinerja dari pencapaian pemerintah sangatlah penting untuk diukur dengan berbagai ukuran dan dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah dan. Berdasarkan kinerja ini pengelolaan anggaran menggambarkan anggaran yang lebih khusus yang terkait dengan kemampuan untuk selalu menggali potensi daerah. *Good Governance* sangat diidentikkan dengan dilaksanakannya otonomi daerah yang dalam rangka mengefektivitas dan mengefisiensikan pembangunan daerah, kerangka otonomi memiliki prasyarat berupa tata cara pemerintahan yang baik dan bersih dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah pemerintahan. Dengan adanya *Good Governance* merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi-aspirasi atau pendapat-pendapat masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. (Kalangi, 2015)

Dalam pemerintahan daerah diantaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom tentang Penyelenggaraan pengaturan otonomi daerah, pembagian, dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta perimbangannya keuangan pusat dan daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ketentuan isi, sedikit berisi tentang asas-asas otonomi daerah yang diatur oleh UU otonomi daerah indonesia yang pertama ialah Tap MPRI RI No. XV/MPR/1998. dan dengan sejak diberlakukannya Otonomi Daerah dengan UU No. 22 Tahun 1999 berubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004, tentang otonomi daerah UU No. 25 Tahun 1999 menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang keuangan daerah serta diberikannya kekhususan tahun 2001 di Papua, sebagai tonggak pengelolaan keuangan daerah di Indonesia sebagai implementasi. Untuk dapat menerapkan pemerintahan yang efektif dan efisien serta berorientasi maka Pemerintah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom harus berusaha mencapai hasil yang baik dan mempertanggungjawabkan hasil yang telah dicapai menuju *Good Governance* yang lebih baik lagi. dengan demikian akan terwujud dengan sendirinya pemerintahan yang baik, rapih, bersih dan berwibawa dan bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN)

Pengukuran kinerja keuangan harus dilakukan agar mampu memberikan informasi atau data tentang Perbandingan kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan untuk mengetahui pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam tujuan pemerintah.

Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom untuk periode 2016-2019 dilihat dari Rasio Kemandirian dan Efektifitas.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menguraikan sifat-sifat dan karakteristik dari suatu objek penelitian. Subjek penelitian adalah laporan keuangan pada Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom yang realisasi anggaran, neraca. Adapun analisa perbandingan rasio yang digunakan oleh Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom terdiri dari 4 rasio yang merupakan rasio kinerja keuangan sebagai berikut:

### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Dwi Asri, 2016)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

### 2. Rasio Efisiensi Belanja

Menurut Mahmudi (2016: 164), rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja dan rasio ini juga digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran kinerja keuangan perbandingan Kinerja Keuangan Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom berdasarkan rasio:

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil dari rasio kemandirian Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom tahun 2016-2019 adalah pada

**Tabel 1.** Hasil rasio kemandirian Kota Jayapura

Tahun	Keterangan	Kota Jayapura	Kabupatenn Jayapura	Kabupaten Keerom
2016	PAD	164.831.615.677,74	87.394.171.937,46	63.814.379.209,76
	P.Transfer	38.741.336.772,00	228.539.531.000,00	113.655.293.002,00
	RKKD	425,47%	38,24%	56,14%
2017	PAD	176.666.250.172,78	96.961.324.536,63	12.683.764.757,00
	P.Transfer	178.293.616.704,00	240.988.569.201,00	94.899.955.002,00
	RKKD	99,09%	40,23%	13,36%
2018	PAD	243.863.618.164,31	88.771.869.296,37	19.490.489.557,58
	P.Transfer	126.359.076.002,00	256.808.353.756,00	94.899.955.002,00

Tahun	Keterangan	Kota Jayapura	Kabupatern Jayapura	Kabupaten Keerom
2019	RKKD	192,99%	34,57%	20,53%
	PAD	235.147.029.261,71	103.441.918.382,37	26.382.782.889,82
	P.Transfer	91.875.747.100,00	195.468.989.891,00	29.015.053.506,00
	RKKD	255,94%	52,92%	90,92%
Rata-rata		243,36%	41,49%	45,24%

Sumber : diolah, 2021

Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

P. Transfer: Pendapatan Transfer

RKKD : Rasio Kemandirian Daerah

Dari tabel 1 terlihat bahwa rata-rata yang diperoleh dari tahun 2016-2019 berdasarkan perhitungan menunjukkan penerimaan Kota Jayapura memiliki tingkat kemandirian keuangan tertinggi yaitu sebesar 243,36% yang berarti pemerintah Kota Jayapura memiliki pola delegatif pemerintah pusat sudah mampu mandiri dalam menggunakan PAD tanpa sepenuhnya tergantung dari dana transfer pemerintah pusat tinggi sebagai kriterianya. Kemudian diikuti oleh pemerintahan Kabupaten Keerom yang memiliki tingkat kemandirian sebesar 45,24%. Selanjutnya yang terakhir adalah Kabupaten Jayapura sebesar 41,49%. Kedua Kabupaten ini memiliki tingkat kemandirian yang rendah yaitu pola hubungannya konsultatif dengan artinya bahwa Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura belum dapat membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat dari PAD.

Namun tingkat kemandirian keuangan tidak selamanya menunjukkan kemandirian atau kemampuan daerah sebenarnya. Ndadari (2008) dan (Putri, 2018) bahwa adanya perilaku asimetris daerah dalam merespon transfer pemerintah pusat. Perhitungan dengan manipulasi belanja menunjukkan bahwa rasio dari pendapatan nasional yang diberikan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah memiliki kolerasi yang positif dengan anggran PAD. Hal ini memberikan kecenderungan bahwa pemerintah daerah akan terus mengupayakan untuk tetap memperoleh DAU di periode-periode yang akan datang.

### Rasio Efisiensi Belanja

Hasil dari rasio efisiensi belanja Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom tahun 2016-2019 adalah pada Tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2.** Hasil rasio efisiensi belanja Kota Jayapura

Tahun	Keterangan	Kota Jayapura	Kabupatern Jayapura	Kabupaten Keerom
2016	A. Belanja	1.404.763.383.619,00	1450.176.516.761,92	973.883.030.996,26
	R. Belanja	1.280.379.079.575,00	1.277.671.317.569,44	887.883.116.565,60
	REB	109,71%	113,50%	109,69%
2017	A. Belanja	1.317.795.457.170,00	1.140.675.421.211,94	891.868.136.657,00
	R. Belanja	1.187.042.622.290,85	1.034.589.321.296,00	773.795.124.875,30
	REB	111,02%	110,25%	115,26%

Tahun	Keterangan	Kota Jayapura	Kabupatern Jayapura	Kabupaten Keerom
2018	A. Belanja	1.219.660.429.903,00	1.148.340.952.545,57	1.333.797.802.167,00
	R. Belanja	1.136.467.522.885,50	1.050.376.445.890,76	1.171.225.960.732,00
	REB	107,32%	109,33%	113,88%
2019	A. Belanja	1.188.689.076.708,00	1.245.887.678.396,54	1.332.010.269.174,98
	R. Belanja	1.134.115.360.472,40	1.153.421.163.601,56	1.051.803.278.491,00
	REB	104,81%	108,02%	126,64%
Rata-rata		108,215%	110,28%	116,37%

Sumber : diolah, 2021

**Keterangan**

- A.Belanja : Anggaran Belanja
- R.Belanja : Realisasi Belanja
- REB : Rasia Efisiensi Belanja

Pada tabel 2 terlihat bahwa rata-rata yang diperoleh dari tahun 2016-2019 berdasarkan perhitungan menunjukkan penerimaan Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabuapten Keerom memiliki tingkat yang sangat efisien yaitu diatas 100% dimana total realisasi belanja sudah mencapai dengan rerata 108%-116% dari total anggaran belanja yang dianggarkan pada APBD. (Karinda et al., 2013)

**KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa analisis rasio kemandirian keuangan belanja daerah, berdasarkan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah 3 Kabupaten/Kota yang dianalisis selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 2016-2019, tingkat kemandirian keuangan daerah tertinggi terjadi pada Kota Jayapura yaitu sebesar 243,36%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Jayapura tidak memiliki ketergantungan yang tinggi lagi terhadap pemerintah pusat dan sudah mampu untuk melaksanakan urusan otonomi daerah. Analisis rasio efisiensi belanja, dari perhitungan rata-rata rasio efisiensi belanja yang diperoleh selama 4 tahun dari tahun 2016-2019 di ketiga Kabupaten/Kota dianalisis menunjukkan pemerintahan Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom mampu mencapai kriteria sangat efisien yaitu diatas 100% yaitu rerata 108%-116%.

**DAFTAR PUSTAKA**

Amalia, N., Budiwati, H., & Irdiana, S. (2021, September). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. In Proceedings Progress Conference (Vol. 4, No. 1, pp. 290-296).

Amelya, B., Nugraha, S. J., & Puspita, V. A. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pt Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk Sebelum Dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 5(3),

534-551

- Astuti, D., & Drajat, D. Y. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Merger Pada Pt Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. *Jurnal Sain Manajemen*, 3(1), 30-40.
- Dwi Asri, J. (2016). Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.17509/Jrak.V4i2.4037>
- Hidayat, M. (2021). Analisis perbandingan kinerja keuangan dan nilai perusahaan sebelum dan disaat pandemi covid 19. *MEASUREMENT: Journal of the Accounting Study Program*, 15(1), 9-17.
- Kalangi, R. (2015). Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Kinerja Aparat Sipil Negara Di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang Ekosobudkum*.
- Karinda, C. Y., Ilat, V., & Mawikere, L. (2013). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Accountability*, 2(2), 73. <https://doi.org/10.32400/Ja.3689.2.2.2013.73-84>
- Khairudin, K., & Grysia, F. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Ace Hardware Indonesia Tbk Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 1(3), 253-264.
- Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Yanza, F Kukasari, L Suprihartini 2016. Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Kauanga Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Pinang. Skripsi. Dengan Artikel Y - Student Online Journal (SOJ) 2020.
- Panduan Penulis Skripsi Fakultas Ekonomi UOGP Tahun 2018,
- Putri, F. Dan I. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Kawasan Metropolitan Mebidangro Tahun Anggaran 2011-2014. *Journal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 317-334
- Said, S. N., & Agustina, P. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perumda BPR Bank Cirebon Sebelum dan Sesudah Pengumuman Pandemi Covid-19. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 1-10.
- Sugiyono.2015:329. "Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.